

Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa di Staf Logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Slog Polri)

Annisa Wahyu Safitri, Satria Aji Imawan

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The implementation of E-Catalog in the procurement of goods/services at the National Police Slog is an effort to modernize government procurement to increase transparency, efficiency, and accountability in accordance with Presidential Regulation Number 12 of 2021 and National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2024. This study aims to analyze the implementation of E-Catalog and identify the driving and inhibiting factors for the implementation of E-Catalog in the National Police Slog. The researcher uses a qualitative descriptive approach with a policy implementation model according to Van Meter & Van Horn, namely policy standards and objectives, resources, communication between organizations, characteristics of implementing agencies, and social, political, and economic factors that affect the success of policy implementation. The results show that the E-Catalog is only effective as an instrument of administrative transparency rather than as a comprehensive prevention tool for irregularities. E-Catalog is not optimal in meeting the needs of complex and high-scale Police Slogs. As a result, the National Police Slog still needs system differentiation. This is due to the more dominant inhibiting factors. Based on these results, the researcher recommends improvements in the management and supervision of the implementation of the E-Catalog, as well as increasing the capacity of human resources in the National Police Slog through intensive training related to the use of this digital system. This study also suggests that the improvement of the E-Catalog system should be carried out by paying attention to the availability of more complete products and the fulfillment of better technical standards in order to really support the operational needs of the National Police optimally.

Keywords: Police Slog, Procurement of Goods/Services, E-Catalog, Policy Implementation

ABSTRAK

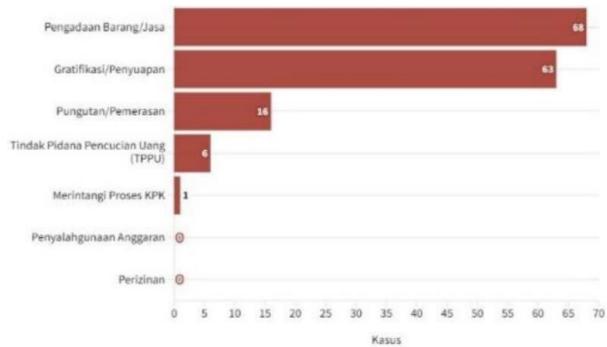
Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan barang/jasa di Slog Polri merupakan upaya modernisasi pengadaan pemerintah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai regulasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi E-Katalog dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi E-Katalog di Slog Polri. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, serta faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa E-Katalog hanya efektif sebagai instrumen transparansi administratif daripada sebagai alat pencegahan penyimpangan yang komprehensif. E-Katalog belum optimal dalam memenuhi kebutuhan Slog Polri yang kompleks dan berskala tinggi. Akibatnya, Slog Polri tetap membutuhkan deferesensi sistem. Hal ini disebabkan oleh faktor penghambat yang lebih dominan. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti merekomendasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pengawasan implementasi E-Katalog, serta peningkatan kapasitas SDM di Slog Polri melalui pelatihan intensif terkait penggunaan sistem digital ini. Penelitian ini juga menyarankan agar perbaikan sistem E-Katalog dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan produk yang lebih lengkap dan pemenuhan standar teknis yang lebih baik agar dapat benar-benar mendukung kebutuhan operasional Polri secara optimal.

Kata Kunci: Slog Polri, Pengadaan Barang/Jasa, E-Katalog, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% pada kuartal pertama 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025). Pertumbuhan ini tidak semata-mata didukung oleh konsumsi dalam negeri dan investasi, melainkan juga oleh pengadaan barang serta jasa. Meskipun pengeluaran pemerintah menurun 1,38% setelah Pemilihan Umum 2024, pengadaan barang/jasa tetap berperan sentral dalam mendukung ekspansi. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor seperti makanan dan minuman, transportasi, serta teknologi dan komunikasi, yang secara kolektif memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia.

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan Pengadaan Barang/Jasa sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah menggunakan anggaran APBN/APBD. Namun, Jumlah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa menempati posisi kedua setelah gratifikasi atau suap. Akibat pemilihan penyedia jasa yang tidak mengikuti standar transparan, melainkan bergantung pada koneksi pribadi atau kesepakatan di luar aturan resmi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).



Gambar 1.1 Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

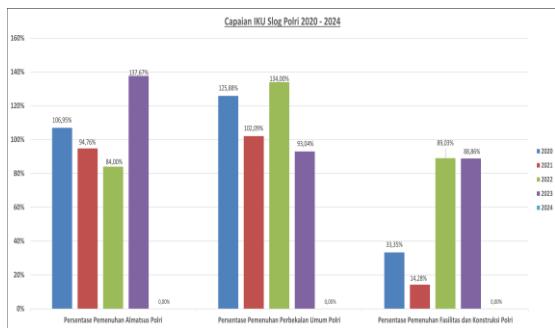
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

Gambar menunjukkan kasus korupsi pengadaan barang/jasa mencapai 68 perkara, atau 44,16% dari total kasus pada 2024, dengan kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp.310,61 triliun. Tingginya kasus korupsi pengadaan barang/jasa mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam pencegahan dan penegakan hukum melalui sistem E-Katalog sebagai inovasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sejak pemerintah mewajibkan implementasi E-Katalog melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Staf Logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Slog Polri), yang bertanggung jawab atas semua aspek logistik kepolisian seperti perencanaan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan aset negara telah mengimplementasikan E-Katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang diperkuat oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disisi lain, terdapat fluktuasi signifikan dalam pelaksanaan pengadaan yang menunjukkan variasi dalam efektivitas implementasi sistem pengadaan digital melalui E-Katalog yang belum merata di seluruh bidang logistik kepolisian (Buku Rencana Strategis Polri, 2025).



Gambar 1.2 Capaian IKU Slog Polri 2020-2024

Sumber: Buku Rencana Strategis Slog Polri, 2025

Gambar menunjukkan bahwa pemenuhan Alat Material Susunan (Almatsus) pada 2020 sangat baik sebesar 106,95%, namun turun menjadi 84% pada 2022 dan naik drastis ke 137,67% pada 2023, yang mengindikasikan efektivitas E-Katalog di sektor Almatsus belum stabil karena tidak tersedia dalam E-Katalog. Adapun pemenuhan perbekalan umum relatif stabil meskipun mengalami penurunan, dari 102,09% pada 2020 menjadi 93,04% pada 2023, yang menunjukkan implementasi E-Katalog cukup

efektif untuk barang umum. Disisi lain, pemenuhan Fasilitas dan Konstruksi mengalami fluktuasi tajam, dari 33,55% pada 2020 ke 88,85% pada 2023, dengan efektivitas terbatas karena kebutuhan logistik Polri tidak sepenuhnya termasuk dalam kategori barang umum.

Meskipun demikian, implementasi E-Katalog di Slog Polri menunjukkan tren positif. Perkembangan ini tercermin dalam data realisasi pengadaan barang/jasa melalui mekanisme E-Katalog selama dua tahun terakhir.

Tabel 1.1 Realisasi Pengadaan Slog Polri via E-Katalog

Tahun	Jumlah paket	Nilai paket
2024	54 paket	Rp. 899.011.539.520,-
2025	65 paket	Rp. 938.336.584.870,-

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Data menunjukkan bahwa kebijakan Polri selaras dengan agenda reformasi birokrasi nasional. Peningkatan paket dari 54 menjadi 65 unit, serta kenaikan nilai pengadaan hampir 4,4%, mencerminkan dorongan positif terhadap implementasi E-Katalog di Slog Polri. Namun, tantangan muncul akibat implementasi E-Katalog belum sepenuhnya optimal seperti keterbatasan E-Katalog dalam menyediakan produk, infrastruktur teknologi yang sering mengalami *error*, kesenjangan literasi SDM senior dengan junior, dan indikasi penyimpangan pada pengadaan logistik Polri, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus

pengadaan gas air mata atas laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

Berdasarkan temuan tersebut. Maka, analisis implementasi E-Katalog di Slog Polri penting untuk menilai bagaimana implementasi E-Katalog dan faktor pendukung dan penghambat, yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat *research question* yaitu “Mengapa meski E-Katalog telah di implementasikan sejak lama, Slog Polri masih menghadapi tantangan dalam proses implementasinya, termasuk ditemukannya indikasi korupsi dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri?”

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah integrasi berbagai teori dan praktik yang bertujuan memperdalam pemahaman interaksi pemerintah dengan masyarakat yang diawasi, serta mendorong kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nicholas dalam Harbani Pasolong, 2010). Administrasi publik mencakup kerjasama antar individu di organisasi publik untuk menyelesaikan masalah melalui implementasi kebijakan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai tujuan publik. Dalam penelitian ini administrasi publik dihubungkan dengan bagaimana pemerintah

mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan publik.

B. Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry menjelaskan bahwa kriteria suatu disiplin ilmu meliputi penekanan dan lokus dalam administrasi publik. Penekanan menyangkut pendekatan dasar pemecahan masalah, sedangkan lokus berkaitan dengan bidang atau konteks spesifik penerapannya (Nicholas Henry, 2013). Nicholas Henry mengidentifikasi enam paradigma yaitu dikotomi antara politik dan administrasi negara, prinsip-prinsip administrasi, administrasi negara sebagai ilmu politik, paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi, administrasi negara sebagai administrasi negara dan administrasi publik dan urusan publik. Penelitian ini termasuk dalam paradigma 5, yang menekankan fokus pada kebijakan publik dan lokus di birokrasi, sesuai dengan implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Kebijakan Publik

Kebijakan publik melibatkan pengalokasian sumber daya strategis untuk menangani masalah pemerintah atau masyarakat. Kebijakan ini dapat diklasifikasikan sebagai nasional, regional,

atau lokal berdasarkan tingkat otoritasnya, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, serta bupati/walikota (Tangkilisan, 2003). Tahapan proses kebijakan menurut Riant Nugroho terdiri atas penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Riant Nugroho, 2014). Berdasarkan deskripsi berikut, penelitian meneliti implementasi kebijakan.

D. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan fase krusial dalam proses kebijakan publik yang dirancang untuk menangani masalah tertentu, dimulai dengan sasaran yang eksplisit guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan pada masyarakat menghasilkan dampak yang diinginkan (Gaffar dalam Wahab, 2009). Implementasi kebijakan sebagai serangkaian langkah penerapan keputusan oleh aparatur pemerintah, yang mencakup tahapan dari perencanaan hingga penilaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Riant Nugroho, 2014). Konsep ini menyoroti bagaimana kebijakan diubah menjadi aksi serta pelaksanaannya di lapangan.

E. Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan pada hakikatnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut umumnya dijelaskan melalui model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh para ahli sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika proses pelaksanaan kebijakan. Peneliti menggunakan pendekatan *top-down* yaitu model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan menghasilkan enam variabel dapat mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan
Mengacu pada tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan dan standar untuk menilai pencapaiannya.
2. Sumber daya
Baik manusia atau non manusia, sebagai faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif.
3. Karakteristik lembaga pelaksana
Mengacu pada kepatuhan terhadap SOP dan kesesuaian sikap pelaksana terhadap tujuan kebijakan.
4. Disposisi pelaksana
Mencakup pengetahuan pelaksana, pemahaman terhadap isi dan tujuan

kebijakan, serta sikap mereka terhadap kebijakan.

5. Komunikasi antar organisasi

Suatu lembaga tidak dapat beroperasi secara mandiri sehingga perlu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga lain.

6. Faktor sosial, politik, dan ekonomi

Mencakup penerimaan masyarakat, keselarasan kebijakan pemerintah dengan tujuan program, dan kecukupan sumber daya finansial untuk pelaksanaannya.

F. Pengadaan Barang/Jasa Slog Polri

Dalam melaksanakan pengadaan rutin, Slog Polri memanfaatkan E-Katalog untuk pembelian langsung dari pemasok tersertifikasi, mempercepat proses dan memangkas birokrasi. Sedangkan untuk pengadaan strategis dan kompleks menggunakan E-Tendering dan LPBJ. Kolaborasi E-Tendering, E-Katalog, dan LPBJ mendigitalisasi sistem akuisisi Slog Polri, mendukung transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta kontribusi pada Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang/jasa.

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Etalase Produk, Produk, dan Penyedia

Tahun	Jumlah Etalase	Jumlah Produk	Jumlah Penyedia
2023	8	45.279	1.084
2024	8	83.423	1.768

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Sejak 2023, Polri menerapkan strategi pengurangan impor sistematis untuk tingkatkan belanja PDN dan partisipasi UMK-KOP. Strategi meliputi alokasi 40% anggaran untuk PDN dan UMK-KOP, serta perluasan katalog elektronik sektoral. Polri menambah empat kategori dan 27 subkategori, menggelar sosialisasi sertifikasi TKDN, perhitungan nilai TKDN, dan bimbingan operator SIRUP.

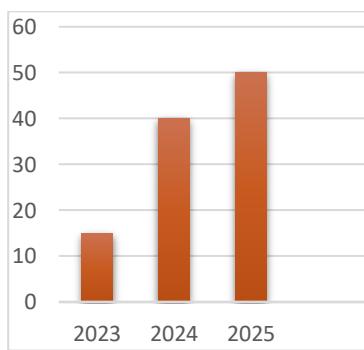
Hasil terlihat peningkatan tiap tahun, di 2023 jumlah katalog delapan etalase, 45.279 produk dari 1.084 pemasok lokal dan di 2024 jumlah katalog stagnan di delapan etalase tetapi mengalami kenaikan di 83.324 produk, 1.768 pemasok. Hal ini menunjukkan proporsi PDN dari di bawah 50% menjadi lebih tinggi melalui intervensi, meningkatkan partisipasi lokal, basis TKDN, efisiensi, dan kemandirian. Ini selaras dengan Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan target 40% belanja PDN.

Keberhasilan pengadaan barang/jasa Slog Polri terlihat dari pemberian WTP dari BPK RI 11 kali berturut-turut hingga 2024, menunjukkan pengelolaan keuangan

transparan dan akuntabel. Konsistensi ini membangun kepercayaan publik dan membuktikan efektivitas. Namun, akuisisi Slog Polri menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

G. Implementasi E-Katalog di Slog Polri

Slog Polri telah menerapkan sistem *E-Purchasing* melalui E-Katalog berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diperkuat oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi E-Katalog di Slog Polri berhasil memenuhi kebutuhan umum dan rutin seperti perlengkapan dinas.



Gambar 1.3 Tren Peningkatan Penggunaan E-Katalog dalam PBJ Slog Polri

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Data menunjukkan implementasi E-Katalog di Slog Polri mengalami tren positif, terbukti dari peningkatan paket dari 54 menjadi 65 antara 2024 dan 2025, serta kenaikan nilai akuisisi hampir 4,4%, yang mengindikasikan

dorongan kuat terhadap adopsi E-Katalog di Slog Polri. Namun, terbatas pada jenis umum atau non-strategis.

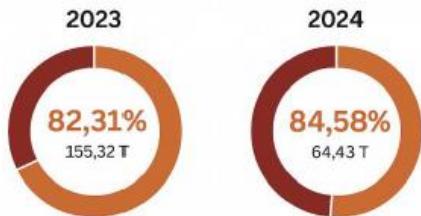
METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi dengan analisis domain. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi E-Katalog di Slog Polri membawa perubahan signifikan terhadap efektivitas dan transparansi proses pengadaan, dengan kemudahan bagi pejabat pengadaan dalam memilih barang yang sesuai kebutuhan melalui fitur perbandingan harga dan spesifikasi seperti *marketplace*. Hal ini dibuktikan oleh capaian pemanfaatan E-Katalog. Sebagai berikut:



Gambar 1.4 Capaian Pemanfaatan E-Katalog Slog Polri

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Data menunjukkan bahwa kemajuan dalam akuntabilitas dan efisiensi pengadaan, dengan fokus pada pencegahan korupsi melalui transparansi harga dan akuntabilitas proses. Selain E-Katalog, Slog Polri mengimplementasikan E-Tendering, dan LPBJ yang di kelompokkan sesuai kompleksitas barang. Hal ini menekankan diferensiasi sistem sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan keamanan organisasi.

Standard Operating Procedure (SOP) berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* melalui verifikasi dokumen seperti akta usaha, izin, dan perpajakan, sementara monitoring oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan auditor meningkatkan akuntabilitas. Hal ini terbukti dalam capaian indeks tata kelola pengadaan barang/jasa kepolisian negara republik indonesia. Sebagai berikut:



Gambar 1.5 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber: LKPP, 2025

Data membuktikan Slog Polri memiliki konsistensi tinggi. Hal ini di dukung oleh Penyedia barang melaporkan efisiensi waktu, transparansi harga, dan pengurangan interaksi langsung sebagai manfaat utama, yang mendukung tujuan kebijakan untuk meminimalkan penyimpangan dan mempercepat proses pembelian. Namun, keterbatasan pada barang strategis seperti Almatsus mencerminkan kesenjangan antara standar katalog nasional versi 6 (V6) dan kebutuhan spesifik Polri.

Hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa standar kebijakan harus adaptif terhadap konteks organisasi agar implementasi tidak terbatas pada aspek rutin, sehingga menjaga keamanan informasi strategis

Sumber Daya

Sumber daya di Slog Polri menunjukkan ketersediaan yang memadai secara nominal, dengan 213 PPK bersertifikat okupasi tipe A dan B, 950 pelatihan tipe C, 74 sertifikat Pejabat Pengadaan (PP), dan 364 sertifikat Pokja, yang

mendukung kompetensi pelaksana dalam pengadaan elektronik.

Disisi lain, anggaran pagu Polri sebesar Rp99,3 triliun pada 2024 mencapai realisasi 70,3% untuk belanja modal, dengan efisiensi sebesar 16,26% atau Rp20,58 triliun, meskipun terbatas oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mempengaruhi prioritas kebutuhan strategis. Sebagai berikut:

Tabel 1.3 Total efisiensi belanja barang dan modal Slog Polri

Belanja Barang	Rp.6.687.500.000.000	19,62%
Belanja Modal	Rp.13.901.900.000.000	42 %

Sumber: Disusun oleh penulis, 2025

Gambar menunjukkan bahwa Slog Polri mengalami efisiensi sebesar Rp. 20,58 Triliun atau 16,26% dari total anggaran dengan efisiensi belanja barang mencapai Rp6.687.500.000.000 (19,62%), sedangkan belanja modal Rp13.901.900.000.000 (42%), yang menunjukkan fokus pada modernisasi peralatan namun belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan seperti peralatan DF bernilai tinggi.

Disisi lain, Infrastruktur Slog Polri mencakup 1.516.766 unit aset tetap, termasuk 1.226 kendaraan darat, 21.268 senjata, 503 peralatan komunikasi, dan 4.000 peralatan kantor, yang stabil di pusat namun tidak merata di wilayah akibat gangguan listrik dan jaringan yang mempengaruhi sosialisasi dan pelatihan online. Meskipun demikian, variasi kompetensi sumber

daya manusia terlihat pada generasi senior yang mengalami kesulitan dalam adaptasi digital, sehingga memerlukan *backup* dari pelaksana berpengalaman untuk menjaga keseragaman praktik.

Analisis temuan ini mengindikasikan bahwa sumber daya Slog Polri memadai secara tetapi tidak merata dalam distribusi, dengan alokasi anggaran yang tidak proporsional terhadap kebutuhan strategis. Hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa sumber daya yang tidak merata dapat menyebabkan implementasi suboptimal, karena kualitas pemerataan lebih krusial daripada jumlah nominal.

Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana di Slog Polri ditandai oleh struktur peran yang jelas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mencakup Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pokja, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan tim pendukung, Integritas agen diperkuat melalui pakta integritas dan verifikasi bertingkat, dengan kesiapan adaptasi tinggi yang didukung oleh pelatihan rutin dan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 81,38 pada 2025, yang menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem.

Namun hambatan seperti *error* sistem, pembayaran, dan tanda tangan elektronik selama

transisi V5 ke V6 menyebabkan beralih ke mekanisme alternatif seperti E-Tendering dan LPBJ. Komitmen hukum dan transparansi diperkuat melalui klarifikasi internal hingga koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pencegahan penyimpangan.

Analisis temuan ini menunjukkan bahwa agen pelaksana kompeten secara administratif dengan integritas tinggi, tetapi terhambat oleh ketidakstabilan teknis V6. Hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa agen yang kompeten namun kurang didukung teknis akan mengalami kesulitan, dengan integritas sebagai penguat kontrol internal untuk mencegah penyimpangan.

Disposisi Pelaksana

Disposisi implementor di Slog Polri ditandai oleh komitmen tinggi yang tercermin dalam audit berlapis oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta pengendalian prosedural yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini dibuktikan dengan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Polri. Sebagai berikut:

Tabel 1.4 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Polri

No.	Satker	Nilai	Predikat
1.	Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri	80,71	A
2.	Inspektorat Pengawasan Umum Polri	80,42	A
3.	Pusat Keuangan Polri	79,66	BB
4.	Badan Intelijen Keamanan Polri	79,60	BB
5.	Staf Logistik Polri	79,16	BB

Sumber: Laporan AKIP Polri, 2025

Data menunjukkan Slog Polri menduduki Tingkat ke lima skor tinggi sebesar 79,16 dengan predikat BB, yang mengindikasikan konsistensi efisiensi dan akuntabilitas. Disisi lain, perubahan V6 membatasi kewenangan LPSE dalam mengatasi permasalahan E-Katalog. Namun pelaksana tetap memberikan respons adaptif ditunjukkan melalui eskalasi sistematis ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengatasi kendala teknis seperti *error* dan gangguan server, dengan mekanisme alternatif seperti E-Tendering dan Lelang Pengadaan Barang/Jasa (LPBJ) untuk menangani ketidakselarasan spesifikasi.

Kepatuhan selektif terhadap V6 melibatkan penolakan pemuatan data di server pihak ketiga akibat perubahan V5-V6 yang menghapus E-Katalog sektoral menjadi nasional. Sehingga Slog Polri menolak guna melindungi kerahasiaan, yang menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan regulasi nasional dan tanggung jawab keamanan institusional. Analisis temuan ini mengindikasikan

disposisi yang adaptif dan komitmen audit tinggi, namun terhambat oleh kesenjangan spesifikasi V6.

Hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa disposisi adaptif dapat mengatasi hambatan, tetapi jika spesifikasi kebijakan tidak selaras, implementasi akan terbatas.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi di Slog Polri dilakukan melalui metode formal seperti rapat dan notulensi, serta non-formal seperti diskusi ringan dan aplikasi *WhatsApp* untuk koordinasi antara Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan *user* guna memastikan aliran informasi yang cepat dan responsif. Kejelasan informasi diperoleh melalui dialog terbuka dan verifikasi bertahap untuk menghindari miskomunikasi, dengan konsistensi dicapai melalui koordinasi lintas unit dalam survei harga, penyusunan spesifikasi, dan publikasi E-Katalog, yang melibatkan tim pendukung untuk analisis teknis.

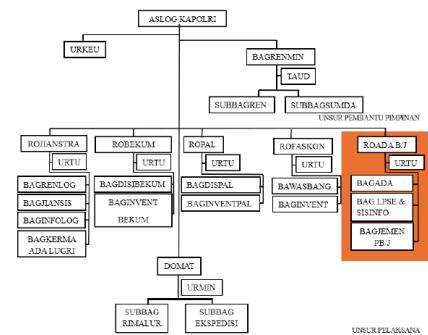
Slog Polri juga melibatkan penyedia melalui sistem dan rapat untuk menangani keluhan, sehingga memperkuat hubungan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa. Analisis temuan ini menunjukkan komunikasi yang efektif secara struktural dengan dialog terbuka dan kontrol administratif, tetapi terhambat oleh keterbatasan digital.

Hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa komunikasi yang jelas secara

struktural namun kurang responsif digital akan menghambat implementasi.

Faktor Sosial, Politik, dan Ekonomi

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di Slog Polri ditandai oleh kepatuhan regulatif tinggi terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, yang mendukung struktur organisasi hierarkis dengan koordinasi vertikal dan horizontal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memerlukan restrukturisasi. Sebagai berikut:



Gambar 1.6 Stuktur Organisasi Slog Polri

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Restrukturisasi penting guna meningkatkan fungsi sistemik agar dapat mengakomodasi kompleksitas pengadaan seperti E-Katalog, E-Tendering, Lelang Pengadaan Barang/Jasa (LPBJ), dan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dukungan pimpinan diperkuat melalui audit berlapis oleh Inspektorat Pengawasan Umum

(Irwasum) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sementara tekanan publik dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait transparansi pengadaan gas air mata menciptakan dilema antara transparansi dan kerahasiaan strategis.

Disisi lain Anggaran Polri menunjukkan konteks ekonomi yang stabil namun terbatas, dengan efisiensi anggaran yang mempengaruhi prioritas kebutuhan strategis seperti modernisasi peralatan. Analisis temuan ini mengindikasikan lingkungan yang mendukung transparansi dan regulatif, tetapi terhambat oleh perubahan versi 6 (V6) dan struktur LPSE yang kurang fleksibel.

Hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa lingkungan yang stabil secara regulatif tetapi kurang adaptif struktural akan menyebabkan gangguan, dengan tekanan publik sebagai mekanisme kontrol moral.

KESIMPULAN

Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa di Slog Polri

Implementasi E-Katalog di Slog Polri pada prinsipnya telah memenuhi standar efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, khususnya dalam pengadaan barang umum dan rutin, yang tercermin dari tingkat pemanfaatan yang tinggi serta kemampuannya menyederhanakan prosedur pengadaan dan mempersempit ruang penyimpangan administratif. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan

strategis dan spesifik seperti Almatsus, jasa konsultansi, dan konstruksi berskala besar, sehingga implementasinya masih bersifat parsial dan belum responsif terhadap kompleksitas operasional Polri. Akibatnya, sebagian proses pengadaan tetap membutuhkan deferensiasi sistem.

Faktor pendorong dan penghambat implementasi E-Katalog di Slog Polri

Implementasi E-Katalog di Slog Polri didorong oleh kejelasan kerangka regulasi, struktur organisasi, integritas pelaksana, mekanisme audit internal dan eksternal yang kuat, serta budaya kepatuhan hukum yang tertanam dalam organisasi. Dukungan pimpinan, keterlibatan lembaga pengawas eksternal, serta legitimasi kebijakan secara formal memperkuat komitmen pelaksana untuk menjalankan sistem pengadaan elektronik secara konsisten dan bertanggung jawab.

Disisi lain, implementasi terhambat oleh keterbatasan adaptasi sistem terhadap kebutuhan spesifik Slog Polri, ketidakstabilan teknis E-Katalog V6, kesenjangan kompetensi digital pelaksana, ketimpangan infrastruktur wilayah, serta ketegangan antara tuntutan transparansi publik dan kebutuhan kerahasiaan keamanan negara membatasi keterbukaan informasi dan mempersempit ruang kontrol sosial, sehingga menciptakan dilema struktural dalam pengelolaan pengadaan yang sensitif.

SARAN

1. Penyesuaian desain E-Katalog terhadap kebutuhan strategis Polri

Slog Polri disarankan untuk mengadvokasikan pada level kebijakan nasional melalui perluasan cakupan katalog nasional oleh LKPP dengan mengupayakan integrasi data sektoral dari Polri agar kebutuhan operasional yang relatif kompleks tetap dapat diproses tanpa deferensiasi sistem

2. Rekonstruksi LPSE Slog Polri

Slog Polri disarankan untuk melakukan rekonstruksi terhadap peran dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) internal untuk memperjelas mandat kelembagaan serta memperkuat kewenangan teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

3. Penguatan kompetensi digital sumber daya manusia pengadaan

Slog Polri disarankan untuk melakukan pemetaan kompetensi secara periodik, pelatihan berjenjang sesuai tingkat kompleksitas sistem, serta mekanisme pendampingan internal untuk memastikan bahwa seluruh pelaksana memiliki kemampuan teknis yang setara dalam mengoperasikan E-Katalog.

4. Penguatan stabilitas teknis dan dukungan sistem E-Katalog

Slog Polri disarankan untuk memperkuat koordinasi teknis yang berkelanjutan dengan

pengelola E-Katalog dan LPSE pusat untuk mengantisipasi dinamika perubahan versi sistem dan integritas pelaksana tidak terhambat oleh keterbatasan sistem, yang selama ini mendorong penggunaan diferensiasi sistem.

5. Pengelolaan ketegangan antara transparansi dan kerahasiaan keamanan

Slog Polri disarankan untuk menyusun protokol klasifikasi informasi pengadaan yang jelas guna membedakan antara informasi publik, terbatas, dan rahasia strategis, sehingga prinsip akuntabilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan keamanan nasional dan operasional institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Altharazhi, W. (2023). Efektivitas layanan E-Katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Amelia, L., & rekan-rekan. (2024). Implementasi E-Purchasing dalam pengadaan barang/jasa di Kecamatan Tebet.
- Ariesta, D. (2024). Efektivitas pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog di Kebayoran Lama.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2025. Jakarta: BPS.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (2018). *The public administration dictionary*. Wiley.
- Devanada, A. P., & rekan-rekan. (2023). Pelaksanaan dan akuntabilitas pengadaan

- barang/jasa melalui E-Katalog di Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya.
- Eka, P. P., & rekan-rekan. (2023). Pengembangan *e-government* melalui e-katalog lokal untuk mendorong UMKM di Kabupaten Badung.
- Fadillah, S. S., & rekan-rekan. (2022). Pembelian kendaraan operasional dinas melalui platform E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahanan Provinsi Sumatera Selatan.
- Goodnow, F. J., & White, L. D. (1900). *Politics and administration: A study in government.* The Macmillan Company.
- Indonesia Corruption Watch.* (2025). Laporan dugaan penyimpangan pengadaan gas air mata di Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta: ICW.
- Kaimal, A., & rekan-rekan. (2023). Dampak penerapan E-Katalog terhadap efektivitas dan kepuasan penyedia di Sulawesi Selatan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Statistik tindak pidana korupsi tahun 2024. Jakarta: KPK.
- Maya, N. (2024). Penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Karimun.
- Munawarah, L. (2024). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik di Hulu Sungai.
- Natasha, D. (2024). Efektivitas pengadaan barang/jasa melalui e-katalog lokal di LPSE Kota Tanjungpinang
- Nicholas, H. (2013). *Public administration and public affairs.* Pearson Education.
- Pebrianti, P. (2025). Implementasi kebijakan E-Katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang E-Katalog.
- Ramadhani, D. (2024). Implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Semarang.
- Riant, N. (2014). *Public policy:* Dinamika kebijakan, analisis, dan manajemen dalam proses kebijakan publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sam, N. I. (2024). Efektivitas pengadaan barang/jasa melalui e-katalog di Kabupaten Sinjai.
- Setiawan, I., & rekan-rekan. (2024). Evaluasi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Sihaloho, S. W., & rekan-rekan. (2024). Efektivitas e-katalog pada pengadaan barang/jasa pemerintah dalam upaya pencegahan fraud.
- Soebarini. (2017). Paradigma dan dinamika administrasi publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Syahrudin. (2018). Implementasi kebijakan publik di Indonesia: Teori dan praktik. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2003). Kebijakan publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework.* Administration & Society, 6(4), 445–488.